

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Reformasi 1998 menghadirkan perubahan proses demokrasi di Indonesia. Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden hingga Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung, sehingga menghasilkan Presiden/ Wakil Presiden dan kepala daerah "*Pilihan Rakyat*". Pilihan ini diambil sebagai bagian dari trauma sejarah di masa orde baru yang dianggap mengekang demokrasi. Demokratisasi atas dasar desentralisasi menjadi pilihan untuk menunjukkan eksistensi sebagai individu yang merdeka.

Hal ini dapat kita telusuri dari berbagai peraturan yang dibuat untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Semua peraturan yang mengatur tentang pemerintahan daerah pada prinsipnya selalu menekankan desentralisasi sebagai pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaannya hanya terletak pada sistem penyerahan dan besarnya kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah serta implikasinya.

Daerah diberikan kesempatan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah seluas-luasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Implementasi dari ketentuan ini, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan

pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Diundangkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini dikarenakan kedua Undang-Undang tersebut telah memberi kewenangan yang luas kepada Daerah dan didukung penyediaan dana perimbangan keuangan yang mengandung konsekuensi perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mendasar baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Propinsi dan Kabupaten / Kota (Sihite. M. dan Gunawan Suswantoro, 1999).

Sebagai konsekuensi, daerah harus mendapatkan otonomi yang kuat dalam arti kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga pembangunan daerah dapat selalu dipahami sebagai pembangunan dalam semangat desentralisasi. Otonomi daerah dalam pandangan seperti ini sangat menggarisbawahi keberadaan dan kepentingan masyarakat daerah untuk menjadi sumber inspirasi utama dalam setiap langkah kegiatan pemerintah daerah baik dari aspek pengaturan maupun pelayanan masyarakat.

Menurut Josep Riwu Kaho (2001:63), beberapa faktor yang menjadi penentu keberhasilan otonomi daerah yaitu :

- a. Manusia pelaksana harus baik.
- b. Keuangan harus cukup dan baik.
- c. Peralatannya harus cukup dan baik.
- d. Organisasi dan manajemennya harus baik.

Dari berbagai faktor tersebut di atas, tentunya faktor manusia yang menjadi faktor utama dan esensial, karena manusia di samping menjadi objek juga sebagai subjek dalam segala aktivitas pemerintahan. Faktor manusia bisa menentukan berapa besar keuangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, selanjutnya faktor manusia juga menentukan peralatan apa yang yang diperlukan guna mendukung semua kegiatan pemerintahan dan seterusnya.

Oleh karena itu, faktor manusia menjadi penggerak sekaligus pelaku dalam proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Kaitannya dengan Golkar adalah bahwa otonomi menjadi sarana untuk menampilkan kader-kader Golkar yang memiliki kapasitas dalam menggerakkan pembangunan di era otonomi daerah, melalui praktek pemilu yang dilakoni partai Golkar.

Sesuai dengan amandemen UUD 1945, Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung dan demokratis. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan syarat memperoleh 20% kursi DPR,

atau diajukan oleh gabungan partai politik dengan 25% perolehan suara sah secara kumulatif .

Kehadiran partai politik dengan fungsi rekrutmennya menjadikan partai-partai politik secara leluasa menjaring berbagai kalangan masyarakat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Sebut saja Partai Demokrat yang menciptakan instrument konvensi, walaupun pada prakteknya, partai Golkar sudah lebih dahulu melakukannya. Aktivis partai politik sering menyebutnya sebagai perahu atau kendaraan politik bagi calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sebenarnya, mekanisme penjaringan calon dibuat sedemikian rupa secara transparan dan demokratis serta memperhatikan respon yang berkembang di masyarakat lewat survey-survey yang dibuat oleh berbagai lembaga, termasuk partai politik.

Tetapi, partai politik sering lupa untuk mengajukan calon dari kadernya sendiri dengan alasan keterbatasan sumber daya manusianya, dan minimnya dana untuk kampanye dan pemenangan Presiden dan Wakil Presiden, walaupun syarat paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR juga menjadi ganjalan utama, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008. Bahkan calon dari internal partai mengalami kekalahan pada mekanisme dan rekrutmen yang dilakukan Pimpinan partai politik, misalkan yang teranyar adalah terpilihnya calon presiden dari partai demokrat yang bukan berasal dari kader partai melalui jalur konvensi.

Demikian juga halnya dengan pemilihan kepala daerah. Akibatnya, banyak Kepala Daerah setelah menduduki jabatan Kepala daerah pindah partai sesuai dengan kepentingan politiknya. Namun, fenomena ini tidak terjadi pada Partai Golkar di Sumatera Utara. Bahkan, kader partai yang ikut pemilihan kepala daerah yang bukan memakai perahu Golkar, diawal-awal pencalonannya langsung dipecat dari partai Golkar, tetapi ketika terpilih sebagai kepala daerah malah diangkat sebagai Ketua Umum atau Ketua Badan Pertimbangan Partai Golkar Sumatera Utara. Apakah ini merupakan perilaku pragmatisme politik?

Dalam era otonomi daerah, dominasi partai politik dan gabungan partai politik dalam mengajukan pasangan calon kepala daerah semakin kentara. Dominasi partai tersebut bukan saja dilakukan oleh Pimpinan partai politik di tingkat lokal seperti DPW, DPC atau DPD, tetapi ada juga campur tangan dalam kebijakan partai yang dilakukan oleh Pimpinan partai politik di tingkat pusat DPP. Karena pada umumnya petunjuk pelaksanaan dan aturan main tentang Pilkada, setelah pimpinan partai di tingkat lokal telah menjaring pasangan calon Kepala daerah kemudian dikonsultasikan untuk mendapatkan restu pimpinan pusat partai politik.

Dalam arus besar demokrasi yang desentralisasi tersebut, di mana peran dan fungsi sebuah partai politik begitu besar, dinamika politik sebuah partai layak untuk diamati lebih dalam pada penyelenggaraan otonomi daerah. Fungsi yang dimiliki sebuah partai idealnya menjadi penentu dan berpengaruh terhadap pilihan kebijakan yang akan diperjuangkan, karena kandidat dan partai akan menerapkan kebijakan

sesuai dengan platform yang mereka bangun (Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan,2010).

Hal ini menjadikan studi tentang perilaku politik sebuah partai dan aktivitasnya penting untuk ditelusuri lebih jauh. Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, saya tertarik untuk melihat lebih dalam Partai Golkar yang secara pengalaman politik, telah lama mengitari alam dunia perpolitikan Indonesia, sehingga secara organisasi dan orang-orang yang bergabung di dalamnya dapat diduga sangat berbeda dengan partai politik yang masih berusia seumur jagung, mengingat di Sumatera Utara, rekam jejak Partai Golkar sangat kentara, sehingga bisa lebih memudahkan saya dalam melakukan penelitian lebih dalam lagi.

Ditambah lagi ‘Intrik-intrik’ politik juga menjadi fragmen yang bersambung layaknya sebuah episode sinetron di partai yang awal berdirinya sejak 1964, enggan menyebut dirinya sebagai sebuah partai, ketika masih merupakan Sekber di masa Soekarno dan Golongan Karya pada masa Orde Baru. Partai yang sudah berkuasa selama 32 tahun di masa orde baru, tetap melakoni politik dengan paradigma Golkar Baru sampai saat ini, di mana posisi kadernya menjadi orang nomor dua saat ini, dan sebelumnya menjadi gubernur di Sumatera Utara, tentunya menarik untuk diamati bagaimana dinamika politik di Partai Golkar pada era otonomi daerah ini, khususnya dalam mencermati pertarungan Pilpres 2014 yang memunculkan dinamika di tubuh partai “pohon beringin” ini.

Diawali dengan bermunculannya partai-partai baru yang dibentuk oleh kader-kader terbaik Golkar di Era otonomi daerah, ditambah lagi dengan dinamika dalam pencalonan Abu Rizal Bakrie alias Ical sebagai Capres Golkar. Pertanyaannya, apa yang sesungguhnya terjadi di partai Golkar saat ini? Apakah dinamika di lingkaran pusat kekuasaan partai Golkar yang terkait dengan pilpres juga berdampak luas sampai kepada tingkat politik lokal, khususnya di Kota Medan? Walaupun secara kasat mata di berbagai media, belum ditemukan terbelahnya Partai Golkar Kota Medan saat ini, terkait dengan pencalonan ARB sebagai calon Presiden. Mungkin juga karena ada sebuah kalimat yang senantiasa dipegang oleh kader-kader Golkar sejak lama bahwa “Lebih baik pecah di perut daripada pecah di mulut”?

Hal inilah yang menjadi pertanyaan mendasar dan juga menjadi alasan bagi peneliti untuk mencoba menelusuri Perilaku Politik Elit Partai Golkar di Medan dalam Pilpres 2014.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Ada beberapa pertanyaan yang akan diungkap atau digali dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Perilaku Politik Elit Partai Golkar di Medan dalam Pilpres 2014?
2. Bagaimana Akibat Keputusan Partai Golkar dalam Pilpres 2014 di Tingkat Lokal?
3. Bagaimana Potensi Konflik Partai Golkar di Medan dalam Pilpres 2014?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perilaku Politik Elit Partai Golkar di Medan dalam Pilpres 2014
2. Untuk mengetahui Akibat Keputusan Partai Golkar dalam Pilpres 2014 di Tingkat Lokal
3. Untuk mengetahui Potensi Konflik Partai Golkar di Medan dalam Pilpres 2014

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah referensi yang berkaitan dengan pengembangan ilmu antropologi politik khususnya tentang manajemen partai politik dan politik lokal.
2. Memberikan masukan agar lebih profesional bagi pengurus partai politik dalam memutuskan masalah-masalah kepartaian umumnya dan khususnya dalam bingkai politik lokal.
3. Memberikan gambaran perilaku politik elit partai lokal dalam proses pemenangan pilpres 2014